

## Analisis Konten Podcast Youtube Revolt Official Channel sebagai Media Literasi Politik

Chikita Arone<sup>1</sup>, Eka Vidya Putra<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [ekavidyaputra@fis.unp.ac.id](mailto:ekavidyaputra@fis.unp.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 3 konten pada *playlist podcast* Revolt Official Channel (ROC) sebagai media literasi politik. Hal ini menarik untuk dikaji karena masifnya perkembangan informasi saat ini diperlukan suatu media baru yang dapat meliterasi masyarakat dengan cara yang benar. Dalam konteks literasi politik, ROC berposisi sebagai media yang menyajikan konten literasi politik melalui pemanfaatan media sosial Youtube. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tipe studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di kantor ROC di Jl. Komplek Perumahan BPD No 5 Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori analisis isi oleh Jhon Fiske. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, pada lembaga ROC, peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan riset kepustakaan. Kedua, peneliti melakukan pengumpulan data pada video konten yang diteliti dengan menganalisis, serta mencari titik literasi politik yang menjadi substansi. Teknik pemilihan informan melalui *purposive sampling* yang terdiri dari tiga orang pengelola ROC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Episode Rahmat Bagja Ketua Bawaslu RI & Harapan Penyelenggaraan Pemilu, terdapat 3 tema yang menjadi substansi literasi politik diantaranya (antisipasi berita *hoax* di media sosial, fenomena politik uang, problematika Bawaslu daerah). *Kedua*, Pada episode Kenapa Pemilih Tidak datang ke TPS, terdapat 2 tema yang menjadi substansi literasi politik diantaranya (strategi KPU. Padang Pariaman dalam sosialisasi pemilu & faktor pemilih tidak datang ke TPS).

**Kata Kunci:** Analisis Konten; Literasi Politik; Revolt Official Channel; Youtube.

### Abstract

This study aims to describe three contents in the podcast playlist of the Revolt Official Channel (ROC) as a medium for political literacy. This topic is interesting to study due to the massive development of information today, which requires a new media platform that can educate the public in the right way. In the context of political literacy, ROC positions itself as a media that presents political literacy content through the use of the YouTube social media platform. This research employs a qualitative descriptive approach with a documentary study type. The research was conducted at the ROC office located at Jl. Komplek Perumahan BPD No. 5 Air Pacah, subdistrict Koto Tangah, Padang City. The theory used for analysis is the content analysis theory by John Fiske. Data collection in this study was carried out through two methods. First, at the ROC institution, the researcher conducted observations, interviews, documentation, and literature research. Second, the researcher collected data from the video content being studied by analyzing and identifying political literacy points as the main substance. The informant selection technique was purposive sampling, consisting of three ROC managers. The results of the study show that: First, in the episode Rahmat Bagja, Chairman of Bawaslu RI & Expectations for Election Organization, there are three themes that become the substance of political literacy, including (anticipating hoax news on social media, the phenomenon of money politics, and the problems of Bawaslu in the regions). Second, in the episode Why Do Voters Not Come to the Polling Station?, there are two themes that form the substance of political literacy, including (the strategy of the KPU Padang Pariaman in election socialization and factors influencing voters not coming to the polling stations).

**Keywords:** Content Analyst; Political Literacy; Revolt Official Channel; Youtube.

**How to Cite:** Arone, C. & Putra, E.V. (2024). Analisis Konten Podcast Youtube Revolt Official Channel sebagai Media Literasi Politik. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 7(4), 406-416.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2024 by author.

## Pendahuluan

Seiring dengan masifnya perkembangan teknologi membawa masyarakat pada era digital. Era digital adalah era dimana berlimpahnya informasi yang tersaji di ruang-ruang media sosial (Heryanto, 2018). Saat ini dengan tumpah-ruahnya informasi, publik dibuat tak berdaya untuk bersikap kritis dalam memilah dan memilih laju informasi (Syamsuddin, 2019). Konsekuensi lanjutan dari fenomena ini membuat publik rentan tergiring dengan informasi *hoax* yang tersebar di ruang-ruang media sosial. Akibatnya, sadar atau tidak sadar menjadi mata rantai kebohongan dan manipulasi psikologis ala *viral* media sosial (Heryanto, 2018). Oleh karenanya, diperlukan suatu media yang dapat mengedukasi khalayak publik dengan cara yang benar sehingga mendorong partisipasi publik serta dapat meningkatkan daya intelektualitas masyarakat yang termanifestasi dengan terlibat aktifnya masyarakat dalam melihat, memandang serta bahkan mampu mengevaluasi berbagai kinerja pemerintah melalui media sosial. Keterlibatan aktif masyarakat pada media sosial ini dapat meningkatkan literasi politik masyarakat itu sendiri.

Salah satu media baru yang mendapatkan atensi positif, sekaligus bisa menjadi sumber pembelajaran politik dikalangan masyarakat adalah youtube (Hadi, 2019). Atensi positif tersebut didasari oleh penggunaan youtube sebagai sumber pembelajaran yang mudah untuk diakses. Selain itu, media yang dapat diakses secara daring ini dapat dipergunakan sebagai perangsang pikiran, peningkatan daya analisis, serta sebagai bahan refleksi bagi masyarakat. Hal ini akan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dan ikut memberikan perspektif di laman komentar youtube sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran (Viñes & Río, 2020). Keberadaan youtube sebagai sumber informasi dan edukasi dewasa ini telah menjadi salah satu preferensi utama dan terpopuler di setiap lapisan masyarakat (Srinivasacharlu, 2020). Sebagai sumber rujukan informasi dan edukasi peran youtube cukup signifikan dalam memperkuat literasi digital masyarakat utamanya dikalangan anak muda (Nadia, 2023).

Berkaca pada workshop yang dilakukan oleh Japelidi (Jaringan Pegiat Literasi Digital) dan Konsulat Jenderal Kedutaan Besar (Kedubes) USA di Universitas Andalas, Padang dengan tema "*Building Youth Resilience and Participation in Digital Literacy During the Political Year*" workshop ini memberikan kesimpulan bahwa tentang perlunya konsistensi dalam melakukan syiar literasi, termasuk upaya memperkuat literasi media, agar tidak terperangkap dalam informasi *hoax*, termasuk informasi politik yang dapat merusak demokrasi, upaya sosialisasi yang dilakukan Japelidi ini merupakan wujud nyata dari tentang perlunya literasi digital dan literasi media (Feru, 2023).

Lembaga *We Are Social* dan *Hootsuite* turut andil berkontribusi mempublikasikan hasil temuannya mengenai penggunaan media digital, dimana lembaga ini mengungkapkan ada 2,51 miliar pengguna youtube di seluruh dunia pada Januari 2023. Indonesia menempati posisi keempat dengan jumlah pengguna youtube mencapai 139 juta pengguna (Annur, 2023). Berkaca pada temuan riset yang dilakukan oleh *We Are Social* dan *Hootsuite* ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, pada esensinya youtube memiliki peran yang cukup signifikan, dalam kaitan sebagai sumber informasi dan sebagai sumber edukasi di kalangan masyarakat. Untuk memperkuat hasil riset yang dilakukan oleh lembaga *We Are Social* dan *Hootsuite*, peneliti juga menemukan data lainnya dari hasil survei Katadata Insight Center mengenai jenis konten yang diminati oleh masyarakat untuk memperoleh informasi politik. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa jenis konten *podcast* menempati posisi kedua dengan perolehan 44,3% yang terhitung semenjak bulan November 2023 (Annur, 2023). Berkaca dari hasil temuan riset tersebut peneliti memandang bahwa media youtube sebagai sumber literasi politik pada jenis konten *podcast* perlu dilakukan, untuk melihat seberapa besar pesan politik itu tersampaikan kepada masyarakat.

Merujuk kepada website [Onlinelearning.binus.ac.id](https://onlinelearning.binus.ac.id) menyatakan bahwa perkembangannya *podcast* menjelma sebagai media yang digemari oleh khalayak publik ([Onlinelearning.binus.ac.id](https://onlinelearning.binus.ac.id), 2021). Munculnya jenis media sosial baru yakni *podcast* dapat menjadi alternatif baru bagi khalayak publik untuk dimanfaatkan sebagai sumber literasi politik (Panuju, 2023). Merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Murphy (2018) ia mengungkapkan bahwa *podcast* adalah video digital yang tersedia di Internet yang sebelumnya di-*upload* ke komputer ataupun perangkat seluler oleh para *content creator* dengan menggunakan media sosial youtube sebagai tempat penyimpanan, *podcast* yang telah dikirim ke youtube nantinya akan bisa ditonton, di *download* oleh para pengunjung youtube dalam hal ini dikenal dengan istilah para *netizen* dan

---

*subscribers*. Salah satu platform media youtube yang intensif dalam menyajikan informasi dan literasi politik kepada khalayak publik khususnya di Sumatera Barat saat ini adalah Revolt Official Channel. Semenjak berdirinya Revolt Official Channel mereka senantiasa meliterasi khalayak publik salah satunya pada aspek politik di berbagai kontennya. Baik melalui website mereka yang beralamat di [revoltoofficialchannel.com](http://revoltoofficialchannel.com) serta juga melalui channel youtube Revolt Official Channel. Merujuk kepada laman profile youtube Revolt Official Channel. Revolt official channel *launching* pertama kali pada tahun 2021 tepatnya pada tanggal 14 Juni 2021 (Observasi Online). Revolt Official Channel memiliki visi untuk menghadirkan konten jurnalistik yang berkualitas, kreatif serta edukatif. Misinya yaitu untuk mencerdaskan para penonton melalui konten-konten yang kental akan nuansa paradigmatik sehingga dapat meningkatkan daya intelektualitas para penontonya, adapun outputnya adalah para penonton mendapatkan suatu ulasan-ulasan yang lebih komprehensif dari berbagai konten yang dipublikasikan serta berbeda dengan *media mainstream* lainnya (Observasi Lapangan: Haldi Patra, 20/12/2023).”

Revolt Official Channel merupakan media yang berupaya menyajikan konten-konten yang kental akan nuansa literasi politik serta diulas dengan pendekatan-pendekatan paradigmatik. Disebut demikian, dikarenakan memang media ini dikelola oleh para ilmuwan politik. Disamping itu media ini juga berperan sebagai lembaga konsultan politik, dimana media ini berada dibawah naungan Revolt Institute (Observasi Penelitian, Zorino Farica, 7/05/2024). Sampai pada saat (20 Desember 2023), Revolt Official Channel telah memiliki jumlah jam tayang 359.759 kali ditonton, dengan rincian video yang telah ter-upload pada youtube dengan jumlah 117 video, serta untuk rincian jumlah subscriber Revolt Official Channel saat ini telah mencapai 3,41 ribu subscriber (Observasi Online). Revolt Official Channel sebagai lembaga riset yang ada pada youtube. dalam hal ini memposisikan diri sebagai kelompok intelektual publik, yang diisi oleh para pakar dalam hal ini para dosen (akademisi), serta Revolt Official Channel juga memiliki jaringan pakar lainnya di Sumatera Barat (Observasi Lapangan : Haldi Patra, 20/12/2023).

Penelitian tentang youtube sebagai sumber literasi politik telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu diantaranya, [Nadia \(2023\)](#) penelitian ini mengkaji tentang peran media sosial alam mewujudkan pendidikan politik untuk generasi Z. Riset [Wiharjo \(2022\)](#) juga mengkaji bahwa media youtube efektif digunakan sebagai sarana informasi dan edukasi dilihat dari aspek kognitif, afektif, integrasi pribadi, dan integrasi sosial berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada konten youtube sebagai literasi politik. [Hadi \(2019\)](#) dalam tulisannya menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh channel Youtube “Asumsi” dalam meliterasi milenial dengan menghadirkan konten-konten yang berkualitas dalam beragam *playlist* yang dapat dinikmati oleh para *subscribers* sehingga dapat memicu ketertarikan untuk mendalami ilmu politik. Tulisan [Hasibuan \(2021\)](#) menguraikan tentang analisis semiotik channel youtube refly harun tentang koalisi poros surya-anies dan membahas tentang media Youtube sebagai literasi politik dengan menggunakan channel Youtube Refly Harun sebagai fokus kajian penelitian. Kemudian [Wibowo \(2018\)](#) menggambarkan citra politik Presiden Jokowi mengarah pada citra politik positif dalam risetnya. Hal itu ditunjukkan dari persentase yang didapatkan di kategori positif yang mencapai 96 dari total sampel 262 yang menghasilkan 729 makna pesan di dalamnya.

Penelitian relevan di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana sama-sama mengkaji mengenai Youtube sebagai media literasi politik. Namun, terdapat perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus, metode dan teori dalam menganalisis temuan penelitian. Fokus penelitian sebelumnya terkait dengan analisis isi pesan politik di berbagai channel youtube. Sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus hanya pada kanal youtube Revolt Official Channel yang dianalisis menggunakan kajian analisis konten. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi dokumentasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tak hanya itu, temuan penelitian juga dianalisis menggunakan teori analisis konten dari Jhon Fiske. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena analisis konten dapat digunakan untuk mengkaji pesan *manifest* maupun pesan *latent* yang terkandung dalam serial konten *podcast* Youtube Revolt Official Channel. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena Revolt Official Channel merupakan akun Youtube yang konsisten mendalami permasalahan politik di Indonesia dan Official Channel ini adalah bagian dari Revolt Institute yang merupakan lembaga riset yang bergerak dibidang politik, sosial dan budaya.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan tipe studi dokumentasi. Studi dokumentasi yang dilakukan pada aspek media sosial cenderung menggunakan pendekatan ini guna mengetahui secara sistematis isi dari sebuah pesan pada media, seperti : surat kabar, film, televisi dan juga media sosial yakni Youtube ([Sugiyono, 2018](#)). Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 7 Maret 2024 s/d 30 Mei 2024. Pengumpulan data melalui *podcast* yang mengandung unsur politik yang dilakukan dengan studi dokumentasi, screenshot adegan yang ada dalam akun Youtube

“Revolt Official Channel”, pada episode yang telah ditetapkan sebagai unit analisis penelitian. Informan penelitian ada 3 orang yang terdiri dari tim *videographer* dan founder dari Lembaga Revolt Institute. Founder merupakan orang yang mengetahui sejarah awal berdirinya Revolt Institute hingga sampai saat ini, tim *videographer* merupakan orang yang ahli dalam bidang editing untuk menghasilkan video yang menarik. Adapun 3 orang informan tersebut yaitu Reno Fernandes yang merupakan founder dari lembaga Revolt Institute, Haldi Patra merupakan pengelola Revolt Institute bidang riset dan penelitian, Zorino Farica merupakan tim *videographer* ROC. Fokus penelitian ini berlandaskan kepada dialog atau hal-hal yang bersifat paradigmatik. Pasca ditentukannya episode yang dijadikan sebagai unit analisis, peneliti memulai dengan cara menyusun dan menuangkan ke dalam bentuk tulisan atau paper akademis mengenai literasi politik yang terkandung dalam konten Youtube Revolt Official Channel pada episode yang menjadi bahan kajian penelitian. Dalam rangka untuk melihat validasi data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Teknik analisis data pada penelitian ini berpedoman kepada teknik analisis isi Fiske (2014) yang dikumpulkan berupa dua bentuk aliran, yaitu aliran pesan yang tampak (*manifest*) dan tidak tampak (*latent*), untuk kemudian diakhiri dengan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan (Eriyanto, 2011).

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan selama kurang lebih dua bulan, maka peneliti menguraikan hasil penelitian untuk literasi politik pada podcast ROC dapat dilihat pada 2 episode yang menjadi fokus penelitian ini yang diuraikan menjadi beberapa *scene* yakni sebagai berikut:

### Episode Rahmat Bagja Ketua Bawaslu RI dan Harapan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Proses riset yang dilakukan pada penelitian ini, peneliti membatasi ruang penelitian, dengan membatasi ruang penelitian tentang bagaimana bentuk nilai-nilai literasi politik yang terkandung pada episode *podcast*: Rahmat Bagja Ketua Bawaslu RI dan Harapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan berpedoman kepada teori dan metode analisis isi Jhon Fiske yang akan digunakan sebagai “pisau analisis”, untuk menganalisis pada episode yang menjadi fokus kajian penelitian. Episode ini menghadirkan Ketua Bawaslu RI yakni Rahmat Bagja, *podcast* dipublikasikan pada media Youtube ROC pada tanggal 25 April 2022, durasi *podcast* 1 jam 9 menit 20 detik, disukai 96 akun, dengan 6 komentar.

Pembahasan yang diangkat pada *podcast* ini terdapat 3 substansi literasi politik yang menjadi pembahasan diantaranya sebagai berikut (antisipasi berita hoax di media sosial, fenomena politik uang, problematika Bawaslu daerah). Tiga substansi literasi politik yang terdapat pada episode di atas akan dilakukan perincian dengan menggunakan teori literasi dasar Ferguson, (2023) yakni terdiri dari literasi mendengar dan literasi analisis, literasi dasar dapat dilihat pada isi dialog yang akan diperinci pada 3 *scene* yang terdapat bab hasil penelitian, sementara literasi analisis dapat dilihat pada bab pembahasan. Dari ke 3 pembahasan yang telah peneliti rumuskan dengan menganalisis pesan tampak dan pesan tidak tampak dengan berpedoman kepada teori analisis isi Jhon Fiske (dalam Eriyanto, 2011), maka literasi politik yang ada pada episode ini dapat terlihat dari melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh *host* kepada narasumber. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan merupakan pertanyaan seputar problematika yang dihadapi oleh Bawaslu serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Bawaslu untuk mengantisipasi permasalahan baik yang kemungkinan akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Literasi politik pada episode ini dihasilkan melalui pesan tampak dan pesan tidak tampak yang sudah peneliti perinci pada setiap tabel pada masing-masing *scene* yang merupakan hasil temuan dari penelitian ini. Berikut ini adalah 3 *scene* yang menjadi substansi literasi politik pada episode: Rahmat Bagja Ketua Bawaslu RI dan Harapan Penyelenggaraan Pemilu 2024.



Gambar 1. Podcast Revolt Official Channel Menit : 10.48-12.04  
(Sumber: dokumentasi Chikita, Mei 2024)

Podcast ini (lihat gambar 1) menghadirkan Bapak Eka Vidya Putra sebagai host menanyakan terkait dengan persoalan bagaimana Langkah taktis yang dihadirkan oleh bawaslu dalam mengatasi bersiliwerannya berita hoax menjelang pemilu. Eka Vidya Putra mengungkapkannya sebagai berikut:

“...Pemilu 2024 itu akan didominasi oleh generasi Y dan Z, artinya, mayoritas pemilih ini dibesarkan & beraktivitas di dunia yang serba digital, Nah dalam konteks ini akan ada kemungkinan kedepan itu *hoax* kemudian pembelahan-pembelahan akan semakin kental terjadi, Nah bagaimana upaya Bawaslu dalam mengantisipasi *hoax* ini, mengingat narasi ini selalu diungkapkan, bagaimana melihat titiknya ini? ...” (Sumber *Podcast* dipublish pada tanggal 25 Februari 2022).

Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mengatasi berita *hoax*, Rahmat Bagja selaku narasumber mengatakan perlunya kerjasama antara pihak Cyber Crime dengan Kominfo. Hal ini diungkapkan oleh Rahmat Bagja sebagai berikut:

“...Mengingat pembuktian media sosial ini agak sulit, memasuki UU ITE, pembuktian di ITE memerlukan sebuah kerja khusus, yang punya kemampuan ini adalah Kepolisian (*Cyber Crime*) dan Kominfo. Akhirnya Bawaslu memutuskan bekerjasama dengan *Cyber Crime* dan Kominfo, begitu diusut ternyata yang menyebar informasi *Hoax* ini adalah akun Buzzer yang sengaja menciptakan berita *hoax*. Adapun langkah yang diambil Bawaslu adalah melakukan *takedown* terhadap akun-akun Buzzer yang disinyalir telah menyebarkan berita *hoax* di media sosial...”(Sumber *Podcast* dipublish pada tanggal 25 Februari 2022).

Dialog di atas peneliti analisis dengan menggunakan teori Analisis Isi Jhon Fiske maka didapatkan pesan *manifest* dan pesan *latent* terkait dengan literasi politik yang disampaikan oleh dua orang pada *podcast* tersebut mengenai berita *hoax* yaitu: Melalui scene dialog ini dapat dilihat, Bawaslu mempunyai langkah taktis dan strategis untuk mengantisipasi penyebaran berita *hoax*, yakni dengan cara melakukan sinergi antar lembaga negara dalam hal ini (Kepolisian/*Cyber Crime* & Kominfo) menjadi mitra utama. Melalui scene adegan ini pesan tersirat (*latent*) yang disampaikan adalah kalau bicara kasus *hoax*, banyak kasus, akan tetapi apakah itu bisa masuk ke ranah pidana? Itu belum tentu, karena pertama pembuktiannya dan juga mencari alat buktinya cukup sulit, karena penyebar berita *hoax* ini melancarkan aksinya dengan akun “anonymous/fake” jadi begitu alat buktinya hilang, kasus pun tidak bisa dilanjutkan.



**Gambar 2. Podcast Revolt Official Channel Menit : 10.48-12.04  
(Sumber: dokumentasi Chikita, Mei 2024)**

Pembahasan yang diulas pada *scene* kedua ini (lihat gambar 2) adalah mengenai *money politic* yang masih menjadi problem yang cukup sulit untuk dihadapi oleh bawaslu, adapun pada pembahasan kali ini Eka Vidya Putra selaku host menanyakan terkait dengan melihat titik dari pelaksanaan *money politic* sebagai berikut:

“...Bagaimana dengan fenomena *money politic* (politik uang) bagaimana cara yang dilakukan oleh Bawaslu untuk melihat titik dari praktik *money politic* yang dilakukan oleh oknum-oknum atau partai politik tersebut?...”(Sumber *Podcast* dipublish pada tanggal 25 Februari 2022).

Rahmat Bagja selaku narasumber mengatakan mengenai putusan yang paling banyak pada pemilu 2019 itu adalah mengenai politik uang. Hal itu diungkapkan oleh Rahmat Bagja sebagai berikut:

“...Jika berkaca pada putusan pemilu tahun 2019 itu terdiri dari 382 putusan, 30 sampai 40 % nya adalah politik uang, akan tetapi yang terkena atau tertangkap tangan biasanya adalah “tangan ke tiga” dalam arti “Dirty Mind” ataupun dalangnya tidak dapat ditemukan, disebabkan sistem pendistribusian dibangun secara rapi, artinya pendistribusian politik uang

ini juga dilakukan secara berantai. ...”(Sumber *Podcast* dipublish pada tanggal 25 Februari 2022).

Dialog di atas peneliti analisis menggunakan teori Analisis Isi Jhon Fiske maka didapatkan pesan *manifest* dan pesan *latent* terkait dengan literasi politik yang disampaikan oleh dua orang pada *podcast* tersebut mengenai berita *money politic* yaitu: Melalui scene dialog ini dapat dilihat, fenomena politik uang masih menjadi sesuatu yang sulit untuk diantisipasi oleh Bawaslu, hal itu disebabkan karena pendistribusian politik uang yang dilakukan oleh oknum “aktor politik” berjalan secara “TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), sehingga sulit untuk dilacak oleh Bawaslu. Oknum “aktor politik” bermain dengan banyak cara untuk mencapai tujuan. Dalam konteks ini yang menjadi sasaran tujuan adalah tentang potensial suara yang akan didapatkan, mereka oknum tersebut melakukan secara “soft” misalnya dengan cara : penggunaan dana desa untuk kepentingan pemilu, pada hakikatnya hal semacam ini adalah bentuk “soft” politik uang, akan tetapi langkah seperti ini dikategorikan sebagai penggunaan fasilitas negara.



**Gambar 3. Podcast Revolt Official Channel Menit : 12.12 - 21-13  
(Sumber: dokumentasi Chikita, Mei 2024)**

Pembahasan yang diangkat pada *scene* ke-3 ini (lihat gambar 3) adalah mengenai problem yang dihadapi oleh Bawaslu tingkat daerah. Dalam kesempatan ini Eka Vidya Putra selalu host menanyakan terkait dengan evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu jik berkaca pada pemilu 2019 dengan menanyakan sebagai berikut:

“...Bagaimana bentuk evaluasi internal Bawaslu jika berkaca pada pemilu 2019 mulai dari pusat sampai tingkat pengawasan di TPS, dan seperti apa keberhasilan Bawaslu kalau diukur dari tugas pengawasan?...”(Sumber *Podcast* dipublish pada tanggal 25 Februari 2022).

Narasumber mengatakan bahwa yang menjadi permasalahan pada Bawaslu daerah adalah mengenai pelatihan yang diberikan terlalu singkat, sehingga pengawas kurang terlalu memahami tupoksi mereka sebagai kader yang menjaga marwah demokrasi. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

“...Untuk DPT tidak banyak evaluasi, yang menjadi catatan evaluasi itu adalah pada proses kampanye, pemungutan suara, masa tenang, dan rekapitulasi yang paling banyak terjadi pelanggaran. Nah, permasalahan utama Bawaslu adalah mepetnya waktu dalam memberikan pelatihan begitu cepat. Akan tetapi untuk mengupayakan agar Bawaslu di tingkat TPS mampu bekerja dengan maksimal disamping menuliskan kejadian yang terjadi di TPS, mereka juga ditugaskan untuk memvideokan jika ada kejadian khusus yang terjadi di lokasi TPS, untuk diserahkan kepada Panwascam Panitia Pengawas di Tingkat Kecamatan...”(Sumber *Podcast* dipublish pada tanggal 25 Februari 2022).

Dialog di atas peneliti analisis dengan menggunakan teori Analisis Isi Jhon Fiske maka didapatkan pesan *manifest* dan pesan *latent* terkait dengan literasi politik yang di ada pada *podcast* tersebut mengenai berita problematika bawaslu daerah yaitu: melalui scene ini permasalahan utama Bawaslu daerah adalah pelatihan yang diberikan begitu cepat waktunya, bagaimana mungkin pengawas di TPS bisa memahami tugas-tugasnya jika waktu pelatihan dan pendidikan hanya 1 hari? terkadang, pengawas di tingkat TPS menuliskan hal yang normal saja, hal yang baik-baik saja, tanpa ada kesalahan sedikitpun baik dari sisi penyelenggara ataupun pemilih yang datang ke TPS. Oleh karena itu kedepan Bawaslu meminta kepada pengawas di TPS, jika mereka kurang mampu menuliskan setiap kejadian yang terjadi di TPS, mereka diminta untuk memvideokan kejadian yang terjadi di TPS, untuk nantinya diserahkan kepada staf Panwascam di Kecamatan. Berbicara tentang belum maksimalnya kinerja pengawas yang bertugas di TPS, yang menjadi titik lemahnya adalah tentang SDM. Pada scene ini, Rahmat Bagja mengingatkan kepada

setiap pengawas. Beliau mengungkapkan dengan sedikit humor atau satire, ungkapan tersebut adalah sebagai berikut “kalaupun ketika masuk garbage, jangan sampai keluarnya garbage-out”. Ungkapan yang disampaikan beliau ini sebetulnya adalah semacam “alarm” kepada seluruh anggota Bawaslu untuk memahami (tupoksi) mereka dengan menjalankan secara profesional, sesuai dengan *tagline* Bawaslu yakni “Bersikap” (Bersinergi, Inovatif, Kepastian hukum, Akuntabilitas, dan Profesionalitas) Fenomena (*Money Politic*) atau Politik Uang.

### Episode Kenapa Pemilih Tidak Datang ke TPS (Zulnaidi – Ketua KPU Kab. Padang Pariaman)

Proses penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, peneliti membatasi ruang penelitian. Pembatasan ruang penelitian adalah tentang bagaimana bentuk analisis nilai-nilai literasi politik yang terkandung pada episode *podcast* : Kenapa Pemilih Tidak Datang ke TPS (Zulnaidi: Ketua KPU Padang Pariaman), dengan berpedoman kepada teori dan metode analisis isi Jhon Fiske yang akan digunakan sebagai “pisau analisis”, untuk menganalisis pada episode yang menjadi fokus kajian penelitian. Episode ini menghadirkan Ketua KPU Padang Pariaman, Zulnaidi *podcast* dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2021, durasi *podcast* 26 menit 48 detik, disukai 25 akun, dengan 0 komentar.

*Podcast* yang ke-2 ini terdapat 2 substansi literasi politik yang menjadi pembahasan diantaranya sebagai berikut : (strategi KPU. Padang Pariaman dalam sosialisasi pemilu/pilkada, faktor rendahnya partisipasi pilkada 2020). Dua substansi literasi politik yang terdapat pada episode di atas akan dilakukan perincian dengan menggunakan teori literasi dasar (Ferguson, 2013) yakni terdiri dari literasi mendengar dan literasi analisis, literasi dasar dapat dilihat pada isi dialog yang akan diperinci pada 2 *scene* yang terdapat pada bab hasil penelitian, sementara literasi analisis dapat dilihat pada bab pembahasan. Dari ke 2 pembahasan yang telah peneliti rumuskan dengan menganalisis pesan tampak dan pesan tidak tampak dengan berpedoman kepada metode analisis isi Jhon Fiske (dalam Eriyanto, 2011) maka literasi politik yang ada pada episode ini dapat terlihat dari melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh *host* kepada narasumber.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan merupakan pertanyaan seputar problematika dan persoalan mengenai pilkada dan pemilu. Pertanyaan yang ditanyakan berkaitan dengan strategi yang perlu dibangun oleh KPU Padang Pariaman untuk menyuarakan pentingnya menggunakan hak pilih kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam memberikan hak suara baik pada saat pilkada maupun pemilu. Selain itu juga dibahas mengenai strategi dalam perekrutan anggota KPU Padang Pariaman sebagai kader demokrasi dalam rangka menghasilkan pemilu/pilkada yang berkualitas. Sumber : <https://youtu.be/fDtC3JMyJVI?si=ikRhfu50YQygnIk1>



**Gambar 4. Podcast Revolt Official Channel Menit: 01.00 – 09.59  
(Sumber: dokumentasi Chikita, Mei 2024)**

*Podcast* ini (lihat gambar 4) menghadirkan Reno Fernandes sebagai *host* menanyakan terkait dengan persoalan perekrutan penyelenggara pemilu. Reno Fernandes mengungkapkan sebagai berikut:

“...Berbicara penyelenggaraan pemilu, tentunya bicara tentang bagaimana sumber daya manusia (SDM) yang akan direkrut, tak berhenti disitu, bagaimana memotivasi pihak penyelenggara ini bekerja dengan baik, serta strategi apa saja yang dilakukan dalam menjamin kualitas terselenggaranya pemilu?...” (Sumber *Podcast* dipublish pada tanggal 04 Oktober 2021).

Proses perekrutan penyelenggara pemilu ada dua strategi yang dilakukan oleh KPU hal ini disampaikan oleh Zulnaidi sbagai narasumber sebagai berikut:

“...Ada 2 strategi yang dilakukan, *Pertama*, Pemanfaatan media sosial, dengan melakukan update narasi pendidikan pemilih. *Kedua*, sebagian besar penyelenggara diisi oleh orang muda,

yang sebagian besar diisi oleh orang yang berusia dibawah 35 tahun, hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin menjadi kader demokrasi, disamping itu mereka juga memiliki kompetensi penguasaan medsos yang baik, serta orang-orang muda ini “full power” dalam bekerja sebagai penyelenggara...”(Sumber *Podcast* dipublish pada tanggal 04 Oktober 2021).

Reno Fernandes sebagai *host* menyimpulkan terkait dengan strategi yang dilakukan oleh KPU dalam proses perekrutan penyelenggara pemilu memanglah harus memilih orang-orang yang melek terhadap teknologi hal ini diungkapkan sebagai berikut:

“...Nah, ini sinkron ya, KPU. Padang Pariaman berpikir, bahwa untuk mengedukasi pemilih, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah gerakan dunia maya (media sosial), serta disinkronkan dengan sumber daya para digital native, artinya strategi yang dilakukan ialah, melibatkan orang-orang muda sebagai penyelenggara yang melek akan teknologi informasi di dalam penyelenggaraan pemilu...”(Sumber *Podcast* dipublish pada tanggal 04 Oktober 2021).

Dialog di atas peneliti analisis dengan menggunakan teori Analisis Isi Jhon Fiske maka didapatkan pesan *manifest* dan pesan *latent* terkait dengan literasi politik yang di sampaikan oleh dua orang pada *podcast* tersebut mengenai berita strategi memilih penyelenggara pemilu yaitu: Ada 2 strategi khusus yang dilakukan oleh KPU. Padang Pariaman dalam menjamin berkualitaskan penyelenggaraan Pemilu : *Pertama*, melakukan sosialisasi mengenai narasi-narasi pendidikan pemilih melalui pemanfaatan media sosial. *Kedua*, mayoritas penyelenggara yang direkrut adalah orang-orang muda, hal ini bertujuan untuk lebih memperbanyak kader-kader demokrasi, disamping itu orang muda ini capable dalam penggunaan media sosial pada saat KPU Kabupaten/Kota lainnya masih memprioritaskan para penyelenggara yang telah berpengalaman, lain halnya dengan KPU.



**Gambar 5. Podcast Revolt Official Channel Menit : 10.00 – 26.48  
(Sumber: dokumentasi Chikita, Mei 2024)**

Reno Fernandes sebagai host menanyakan terkait dengan faktor penyebab pemilih tidak datang ke TPS. Reno Fernandes mengungkapkan bahwa:

“...Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pemilih tidak datang ke TPS sehingga partisipasi pemilih itu rendah pada saat pencoblosan?...”(Sumber *Podcast* dipublish pada tanggal 04 Oktober 2021).

Kemudian Zulnaidi sebagai Narasumber mengungkapkan terkait dengan penyebab rendahnya partisipasi pemilih datang ke TPS. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

“...Kata kunci dari rendahnya partisipasi pemilih adalah, disebabkan calon pemilih yang terdaftar di DPT tidak berada di lokasi TPS pada hari pencoblosan, data riset menunjukkan sebesar 40% dari jumlah calon pemilih tidak berada di lokasi TPS. Adapun rekapitulasi pemilih yang tidak datang ke TPS jumlahnya sebanyak 146.000 orang, 40% diantaranya tidak berada di lokasi TPS hal ini disebabkan karena ada 3 faktor : Faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor para perantau calon pemilih yang ada diperantauan dan masih terdaftar sebagai pemegang KTP Padang Pariaman tidak melakukan *upgrade* KTP...”(Sumber *Podcast* dipublish pada tanggal 04 Oktober 2021).

Reno Fernandes sebagai host menanyakan alasan kenapa masyarakat Padang Pariaman yang diperantauan tidak mau memperbaharui KTP mereka. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

“...Bilamana jika dikaji secara kultur Padang Pariaman, kenapa masyarakat Kabupaten. Padang Pariaman yang ada diperantauan ini tidak mau memperbaharui KTP mereka di perantauan, apa sebenarnya alasan mereka?...”(Sumber *Podcast* dipublish pada tanggal 04 Oktober 2021).

Zulnadi sebagai Narasumber mengatakan bahwa alasan mereka adalah karena apabila mereka memperbaharui KTP maka mereka merasa terputus ikatan batin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Zulnadi sebagai berikut:

“...Ini adalah persoalan ikatan religius magis “ikatan batin” dengan kampung halaman. Mereka seolah-olah kalau merantau dengan memperbaharui administrasi kependudukan, mereka akan merasa terputus ikatan batin dengan kampung halaman...”(Sumber *Podcast* dipublish pada tanggal 04 Oktober 2021).

Reno Fernandes sebagai *host* menyampaikan pandangan beliau terkait dengan rang-orang yang bekerja di sektor formal dalam hal ini PNS akan mengubah administrasi kependudukan mereka yang berada di perantauan, lain hal dengan orang yang bekerja di sektor informal, mereka cenderung tidak akan mengubah administrasi kependudukan mereka meskipun berada di perantauan. Reno Fernandes mengungkapkan sebagai berikut:

“...Orang Padang Pariaman ini yang kita temukan melalui riset, lebih cenderung bekerja di sektor informal, sehingga mereka tidak perlu memperbaharui administrasi kependudukan di perantauan, kecuali mereka bekerja di sektor formal misalnya : bekerja sebagai PNS atau di perusahaan barulah mereka ini wajib memperbaharui administrasi kependudukan, apakah ini memang benar pak?...”(Sumber *Podcast* dipublish pada tanggal 04 Oktober 2021).

Kemudian Zulnadi sebagai narasumber mempertegas pernyataan yang disampaikan oleh Reno Fernandes sebagai *host* dengan mengungkapkan:

“...Menurut saya bisa saja, contoh sederhana, jika kita pergi ke Jakarta, ada beberapa pasar di dominasi orang-orang Padang Pariaman misalnya di Cipulir, saya kira, tidak ada urgensi bagi mereka untuk pindah domisili (KTP), lagian KTP mereka juga tidak akan diperiksa, walaupun diperiksa, mereka juga tidak akan dilarang untuk berdagang disana...”(Sumber *Podcast* dipublish pada tanggal 04 Oktober 2021).

Terdapat 3 faktor penyebab kenapa pemilih tidak datang ke TPS, terdiri dari (Faktor ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor masyarakat di perantauan). Perubahan atau usulan faktualisasi terhadap DPT (Daftar Pemilih Tetap), banyak dari perilaku migrasi masyarakat Padang Pariaman ini tidak mau memperbaharui dokumen kependudukan mereka di perantauan, disebabkan salah satu alasannya adalah adanya ikatan religius magis atau ikatan batin yang mereka rasakan pada kampung halaman.

## Pembahasan

Teori analisis isi (*content analysis*) dapat digunakan dalam menganalisis “*Podcast* Youtube Revolt Official Channel sebagai Media Literasi Politik”. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Geoghegan dan Klass, menyumbangkan pernyataan bahwa podcast begitu potensial untuk diaplikasikan karena keunggulan dari podcas ini memudahkan para pengguna untuk dapat diakses secara otomatis, fleksibel, dan selalu tersedia, serta untuk kontrol berada pada tangan konsumen.

Sebagaimana pada penelitian ini menggunakan jenis konten *podcast* sebagai focus kajian. Pada penelitian ini peneliti memilih *playlist podcast* pada channel Youtube Revolt Official Channel. *Playlist podcast* Youtube Revolt Official Channel dapat dianalisis dengan menggunakan teori Analisis Isi dari Jhon Fiske. Dimana pada teori ini akan ditarik kesimpulan dengan melihat aliran transmisi yang bermuara pada pesan *manifes* dan serta aliran produksi yang bermuara pada pesan *latent* pada *podcast* yang menjadi fokus kajian. Pada kedua aliran tersebut masing-masing mempunyai makna yang berbeda, seperti pada aliran pertama/aliran transmisi penekanannya terdapat pada seorang komunikator yang berperan aktif untuk menyampaikan pesan melalui media berupa berita, kartun, film, iklan, dan sebagainya kepada khalayak dan hubungan ini bersifat hanya satu arah saja karena komunikasi bersifat pasif (Fiske, 2014). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Max Weber dimana analisis isi adalah serangkaian proses yang menyimpulkan dengan benar dari sebuah dokumen, dalam kajian kualitatif, analisis isi berguna untuk menganalisis, serta menginterpretasikan suatu teks (Eriyanto, 2011).

Teori *Content Analysis* bertujuan untuk mengupas objek yang menjadi unit analisis secara presisi, sehingga outputnya diperoleh gambaran dari isi pesan dengan apa adanya, dan betul-betul menggambarkan isi yang senyatanya tanpa adanya keberpihakan dari peneliti, penggunaan konsep analisis isi ini bertujuan

untuk menghasilkan riset penelitian yang jauh dari anggapan “bias” dan subjektivitas dari peneliti. Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Wiharjo (2022) yang mengkaji tentang analisis isi pesan moral yang terkandung dalam serial *Podcast* Deddy Corbuzier dalam episode “Saya Bongkar Semua Siksa Gaga ke Laura” mendeskripsikan tentang emansipasi wanita yang terdapat di media Youtube. Pada *podcast* ini terdapat penyampaian pesan dari peneliti kepada khalayak yang menonton serial *podcast* tersebut agar dapat memahami isi konteks pesan yang mengandung nilai moral, yang mana pada penelitian ini hasil yang dianalisis jauh dari anggapan “bias”.

Hasil riset lainnya merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2023) yang mengkaji tentang peran media sosial dalam mewujudkan pendidikan politik untuk generasi Z. Pada penelitian ini menunjukkan peran media sosial dalam menyajikan pendidikan politik terbilang sangat bagus. Namun, realitanya pada generasi Z di banda Aceh saat ini kebanyakan dari mereka tidak menggunakan sosial media dalam mempelajari serta mencari informasi mengenai pendidikan politik melainkan hanya dimanfaatkan sebagai hiburan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama berfokus kepada penggunaan media sosial sebagai media literasi politik. Penelitian ini lebih berfokus dengan menjadikan media sosial secara keseluruhan dalam mewujudkan pendidikan politik. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Lain halnya dengan penelitian ini yang mengkaji serial *podcast* lebih kepada pesan politik/literasi politik pada episode Rahmat Bagja Ketua Bawaslu RI dan Harapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, dimana pada episode ini terdapat 3 *scene* yang menjadi literasi politik yakni mengenai berita *hoax*. Jika merujuk pada penelitian Wulandari et al. (2023) mengenai berita *hoax* mengungkapkan bahwa sosial media menjadi suatu tempat yang rapuh dimana media sosial saat ini menjadi suatu instrumen dalam penyebaran berita *hoax*. Banyaknya pengguna aktif pada media sosial, bahkan bisa dikatakan “ketergantungan” pada media sosial, semakin memudahkan para penyebar *hoax* untuk beroperasi.

Temuan yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa Youtube mampu dijadikan sebagai sumber literasi politik dalam penelitian ini menggunakan channel Youtube Revolt Official Channel pada *playlist podcast* sebagai fokus kajian dalam menelaah literasi politik dengan menggunakan teori analisis isi dari Jhon Fiske. Hal ini juga sejalan dengan penelitian relevan lainnya yaitu Hasibuan (2021) yang mengkaji tentang media Youtube sebagai sumber literasi politik namun pada penelitian ini menggunakan channel Asumsi sebagai fokus kajian dengan menggunakan teori analisis semiotik.

Hasil temuan pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk berita *hoax* masih menjadi problem yang cukup sulit diatasi oleh pihak bawaslu sehingga perlu adanya kerja sama khusus dengan pihak *cyber crime* dan Kominfo. Hal ini dapat diperkuat dengan hasil temuan dari riset penelitian Parhan et al. (2021) yang berkaitan dengan penyebaran berita *hoax* di seluruh penjuru Indonesia, saluran penyebaran berita *hoax* atau informasi yang salah berasal dari beberapa media yaitu diantaranya: *Facebook* berada di urutan pertama dengan persentase 92,40 %, kemudian disusul urutan kedua adalah aplikasi *chatting* 62, 80 %, sementara urutan ketiga adalah website dengan persentase 39,40%. Menurut Rahmat Bagja dalam *podcast* ini kedepan dalam rangka untuk mengantisipasi berseliwerannya berita *hoax* pada media sosial, Bawaslu melakukan langkah taktis dengan mengusulkan “terobosan” baru, yang mana “terobosan” ini adalah bentuk inovasi dari Bawaslu dengan menambah ketentuan baru yakni dengan mengawasi setiap media sosial baik yang terdaftar resmi maupun akun “fake” dengan melakukan kolaborasi (kerja sama) antar lembaga yakni dengan Kepolisian (*Cyber Crime*) dan Kominfo. Hal ini dilakukan dengan tujuan guna mengantisipasi menjamurnya berita *hoax* di media sosial.

Kemudian *scene* yang kedua mengenai fenomena *money politic*. Pada *scene* 2 yang menjadi literasi politiknya adalah pembahasan mengenai *money politic* yang berjalan secara TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif) yang dilakukan oleh oknum “aktor politik” yang mana kasus ini masih sulit untuk dilacak oleh bawaslu dikarenakan sistem yang dibangun itu menggunakan pendistribusian dengan pola berantai sehingga yang menjadi dalangnya itu sulit untuk ditemukan. Selanjutnya *scene* ketiga mengenai problematika bawaslu daerah.

Pada episode “Kenapa Pemilih Tidak Datang ke TPS (Zulnaidi – Ketua KPU Kab.Padang Pariaman)”, dimana pada *podcast* ini terdapat 2 *scene* yang menjadi literasi politik yakni strategi KPU Padang Pariaman dalam sosialisasi Pemilu. Ada 2 strategi yang dilakukan, Pertama, memaksimalkan pemanfaatan media sosial, dengan melakukan update narasi-narasi pendidikan pemilih melalui akun media sosial KPU. Padang Pariaman. Kedua, strategi SDM penyelenggara dalam tahapan rekrutmen, sebagian besar penyelenggara diisi oleh orang-orang muda, yang sebagian besar diisi oleh orang-orang muda, yang berusia dibawah 35 tahun, hal ini dilakukan dikarenakan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang muda yang ingin menjadi kader demokrasi.

*Scene* kedua mengenai “Faktor Rendahnya Partisipasi Pilkada 2020”. Dalam rangka menyongsong pemilu maupun pilkada pada tahun 2024, hal yang perlu diperhatikan adalah setidaknya ada 2 poin kunci.

Pertama, perbaikan dari aspek kuantitas, misalnya tentang mensosialisasikan mengenai kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih baik pemilu atau pilkada 2024. Kedua, perbaikan dari aspek kualitas, misalnya tentang perbaikan kualitas demokrasi.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Analisis Konten *Podcast* Youtube ROC sebagai Media Literasi Politik dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, pada episode Rahmat Bagja Ketua Bawaslu RI & Harapan penyelenggaraan Pemilu 2024, terdapat tiga tema kunci yang menjadi substansi literasi politik diantaranya, Antisipasi berita *hoax* pada media sosial. fenomena *money politics*, problematika Bawaslu daerah. *Kedua*, pada episode Kenapa Pemilih Tidak datang ke TPS (Zulnaidi, Ketua KPU. Kabupaten Padang Pariaman, terdapat dua tema kunci yang menjadi substansi literasi politik diantaranya: *Pertama*, Strategi KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam sosialisasi Pemilu/Pilkada. *Kedua*, Faktor rendahnya partisipasi Pilkada 2020, subtema ini menyimpulkan terdapat 3 faktor penyebab kenapa pemilih tidak datang ke TPS terdiri dari (Faktor ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor masyarakat di perantauan). Penelitian ini masih terfokus kepada mengkaji analisis konten Channel Youtube Revolt Official Channel pada *playlist podcast* sebagai media literasi politik, dengan dilakukannya penelitian analisis konten mengenai literasi politik pada *channel* Youtube Revolt Official Channel maka implikasi dari penelitian adalah munculnya kesadaran bagi pembaca bahwa memahami politik merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dimasa depan. Dimana masyarakat akan jauh lebih kritis secara pemikiran dalam memahami, mengamati, dan menilai terkait kebijakan yang di implementasikan oleh pemerintah melalui pembahasan mengenai literasi politik yang dibahas dalam *playlist podcast* pada *channel* Youtube Revolt Official Channel. Mengingat peran media saat ini sangatlah berpengaruh dalam menggiring persepsi publik, ada baiknya peneliti berikutnya juga ikut andil dalam melakukan riset-riset analisis konten pada Lembaga yang sama atau lainnya dalam mengkaji topik terkait. Beberapa konten tersebut dapat dijadikan bahan kajian penelitian bagi peneliti berikutnya.

## Daftar Pustaka

- Antara. (2023). Japelidi ajak anak muda Kota Padang sadar literasi media jelang Pemilu 2024. *10 Mei 2023*. Databoks.katadata.co.id. (2023a). Jenis Konten yang Disukai Anak Muda untuk Mendapatkan Informasi Politik (Oktober 2023). *Databoks*.
- Databoks.katadata.co.id. (2023b). Pengguna YouTube di Indonesia Peringkat Keempat Terbanyak di Dunia pada Awal 2023 Media. *Databoks*.
- Eriyanto, E. (2011). *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Penedamedia Group.
- Ferguson B. (2023). *Information Literacy*. <https://www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf>
- Heryanto, G. (2018). *Media Komunikasi Politik : Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*. Jakarta: Ircisod.
- Hadi, M. F. (2019). Analisis Kajian Literasi Politik Pada Channel Youtube Asumsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Murphy, M. (2018). *How To Podcast on Wordpress.com: The Step-By-Step Guide*. UK: Independently published
- Nadia, N. D. (2023). Peran Media Sosial Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik Untuk Generasi Z (Studi Kasus Kota Banda Aceh). UIN Ar-Raniry.
- Onlinelearning.binus.ac.id. (2021). *Semakin banyak Pendengarnya, inilah Tipe-tipe podcast*.
- Panuju, R. (2023). Podcast Politik Indonesia: Upaya Mencari Calon Presiden Indonesia 2024. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 5(1), 53–66. <https://doi.org/10.33366/jkn.v5i1.222>
- Parhan, M., Jenuri, J., & Islamy, M. R. F. (2021). Media Sosial dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam dalam Etika Berekomunikasi. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 59–80. <https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12887>
- Srinivasacharlu, A. (2020). Using Youtube in Colleges of Education. *Shanlax International Journal of Education*, 8(2), 21–24. <https://doi.org/10.34293/education.v8i2.1736>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, M. M. (2019). Hoax di Era Post-Truth dan Pentingnya Literasi Media. Prosiding Seminar Nasional Filsafat (SENAFI) I: Hoax dalam Perspektif Filsafat.
- Victoria Tur Viñes, M. J. G., & Río. (2020). *Apakah YouTube digunakan secara maksimal? Proposal untuk indikator interaktivitas untuk konten YouTuber teratas dalam bahasa Spanyol*. <https://philpapers.org/rec/GONIYB>

- 
- Wibowo, H. A. (2018). Citra Politik Presiden Jokowi dalam Youtube Channel Melalui Aktivitas Vlog (Analisis Isi Deskriptif pada Feedback Netizen di Kolom Komentar Playlist Kabar Kerja). *Jurnal perempuan*, 26(2). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wiharjo, K. E. T. (2022). Analisis Isi Pesan Moral Pada Serial Podcast Youtube Deddy Corbuzier Dalam Episode Saya Bongkar Semua Siksa Gaga Ke Laura. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Wulandari, C. D. et al. (2023). Fenomena Buzzer Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik Pemilu di Indonesia diselenggarakan setiap lima tahun sekali sesuai dengan asas yang digariskan dalam konstitusi dan merupakan mekanisme yang disediakan oleh eksekutif. *Avant Garde : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(01), 134–147.